

ABSTRAK

Jasa *Freight Forwarding* semakin banyak menjamur di Indonesia. Secara Umum, jasa *freight forwarding* dibagi empat segmen yaitu jasa pengurusan transportasi murni (JPT), jasa kepabeanaan, jasa *trucking* dan pergudangan. Dalam prakteknya, perusahaan *freight forwarding* atau *forwarder* (PT Welgrow Indopersada) bekerjasama dengan pihak ketiga dan mayoritas menangani transaksi ekspor dan impor. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut, dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas. *Forwarder* disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka ekspor atau impor. Undang – Undang Perpajakan atas jasa *freight forwarding* khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* sehingga *forwarder* masih kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa *freight forwarding* sehingga Pajak yang dipungut *forwarder* ke konsumen / pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dari hasil analisis menunjukan bahwa *forwarder* belum sepenuhnya memahami perlakuan Perpajakan yang terutang khususnya Pajak Pertambahan Nilai atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan agar *forwarder* mengirimkan surat atau bertanya langsung ke Direktorat Jendral Pajak untuk menjawab permasalahan yang ada dan agar Direktorat Jendral Pajak dapat memberikan kepastian kepada para *forwarder*.

Kata Kunci: Jasa *freight forwarding*, *forwarder*, Ekspor, Impor, Pajak Pertambahan Nilai